



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 1 Maret 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIT KERJA : UNIVERSITAS RIAU

I. DATA PRIBADI

1. Nama : MEXSASAI INDRA
2. Jabatan : WAKIL REKTOR BIDANG AKADEMIK
3. NHK : 650814

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN**

Rp. 935.600.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 360 m2/225 m2 di KAB / KOTA KOTA PEKANBARU , HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
2. Tanah Seluas 7533 m2 di KAB / KOTA KUANTAN SINGINGI, HASIL SENDIRI Rp. 54.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 157 m2/18 m2 di KAB / KOTA KAMPAR, HASIL SENDIRI Rp. 110.000.000
4. Tanah Seluas 1700 m2 di KAB / KOTA KUANTAN SINGINGI, HASIL SENDIRI Rp. 142.000.000
5. Tanah Seluas 2767 m2 di KAB / KOTA KUANTAN SINGINGI, HASIL SENDIRI Rp. 90.000.000
6. Tanah Seluas 3510 m2 di KAB / KOTA KUANTAN SINGINGI, HASIL SENDIRI Rp. 20.600.000
7. Tanah Seluas 352 m2 di KAB / KOTA KAMPAR, HASIL SENDIRI Rp. 19.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 295.000.000

1. MOBIL, HONDA HR-V MOBIL Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
2. MOBIL, HONDA BRIO BRIO SATYA Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 95.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. ----

D. SURAT BERHARGA

Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 399.732.773



F. HARTA LAINNYA

Rp. ---

Sub Total

Rp. 1.630.332.773

III. HUTANG

Rp. ---

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 1.630.332.773

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.